**NASKAH AKADEMIK**

PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI

PGMI MENJADI PGSD DI KEMENAG

LOGO PTKI

NAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)

----KOTA---

2023

# **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kami bisa menuntaskan penyusunan “Naskah Akademik Perubahan Nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Menjadi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar”. Kami menyadari bahwa transformasi nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang memiliki inti keilmuan dan *body of knowledge* lebih dominan ke ilmu umum maka perubahan nomenklatur PGMI ke Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Harapan besar dari perubahan nomenklatur ini untuk memberikan kejelasan masa depan dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni dalam persaingan dunia kerja sebagai guru MI/SD. Kami juga memandang bahwa saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk pengajuan perubahan nomenklatur ini seiring dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI No. B-4866/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/3/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 tentang “Permintaan Naskah Akademik Perubahan Izin Penyelenggaraan Program Studi Selain Rumpun Ilmu Agama”.

Kami menyadari betul bahwa terselesaikannya naskah akademik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama ….. dan …….. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdiskusi, membarikan masukan dan komentar kritis untuk penyempurnaan naskah akademik ini. Semoga naskah akademik ini memberi kebermanfaatan bagi kemajuan ….. dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, jika dalam naskah akademik ini masih ada kekurangan maka saran dan masukan konstruktif dari semua pihak sangat ditunggu. Terima kasih.

Kota …., …. Oktober 2023

Ttd

Nama Ketua Prodi

Ketua Prodi

# **DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR** 2](#_Toc148638807)

[**DAFTAR ISI** 3](#_Toc148638808)

[**A.** **DASAR PEMIKIRAN** 4](#_Toc148638809)

[**B.** **KURIKULUM** 13](#_Toc148638810)

[**C.** **DATA DOSEN** 13](#_Toc148638811)

[**D.** **DATA MAHASISWA** 13](#_Toc148638812)

[**E.** **DATA ALUMNI** 13](#_Toc148638813)

[**F.** **FASILITAS PENDIDIKAN YANG DIMILIKI** 13](#_Toc148638814)

[**G.** **LAMPIRAN 1: SK IZIN PROGRAM STUDI** 13](#_Toc148638815)

[**H.** **LAMPIRAN 2: SK AKREDITASI BAN PT** 13](#_Toc148638816)

[**I.** **LAMPIRAN 3: SK PENGELOLA PROGRAM STUDI** 13](#_Toc148638817)

## **DASAR PEMIKIRAN**

1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, semua komponen bangsa harus terlibat dan mengambil bagian dalam pendidikan baik secara formal, non-formal, maupun informal.

Sebagai sebuah tujuan nasional maka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, jalan, bahkan pemikiran. Ketiga aktivitas inilah yang mendorong Kementerian Agama mengambil peran dalam bidang pendidikan. Tidak hanya informal, Kementerian Agama juga mengambil peran sebagai pengelola dan pengawas pendidikan formal dan non formal, dari jenjang paling rendah Raudhatul Athfal sampai dengan jenjang tertinggi yakni perguruan tinggi, seperti Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Akan tetapi, di tengah banyak hal yang harus terus dikelola, pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama menemui beberapa permasalahan. Salah satunya adalah anggapan bahwa alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama tidak sejajar/sederajat dengan alumni program studi sejenis di perguruan tinggi umum di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, di balik beragamnya jumlah dan jenis jurusan/program studi yang ada di PTKI ternyata masih banyak program studi yang belum dikenali dengan baik. Sebagai contoh, program studi PGMI dianggap sebagai program studi rumpun Ilmu Agama, padahal program studi PGMI merupakan program studi dengan inti keilmuan rumpun Ilmu Umum. Hal ini karena prodi PGMI bertugas mencetak calon guru kelas MI. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru bahwa guru MI/SD secara kualifikasi mensyaratkan lulusan dari perguruan tinggi Program Studi PGSD/PGMI dengan kompetensi utama yang harus dikuasai adalah 5 mata Pelajaran umum (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKn). Kompetensi tersebut pada dasarnya sama dengan keilmuan yang dikembangkan pada Program studi PGSD di Kemendikbudristek.

Dampak dari banyaknya pihak yang tidak mengenal keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi PGMI di PTKI maka pada masa rekrutmen CPNS di banyak Kabupaten/Kota di Indonesia alumni PGMI diperlakukan tidak adil. Seperti pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/1010/KPTS/408.12/2018 tidak bisa menerima alumni/ lulusan Prodi PGMI untuk mendaftar formasi jabatan guru kelas- ahli pertama di SD. Tahun 2019, terulang lagi hal serupa salah satunya di Kabupaten Sleman, menurut Pengumuman Pemerintah Kabupaten Sleman No. 810/02866 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak memberi kesempatan kepada alumni/ lulusan Prodi S1 PGMI mengisi formasi jabatan ahli pertama – guru kelas di Sekolah dasar. Satu-satunya Program Studi yang memenuhi syarat kualifikasi tersebut adalah S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Dalam perkembangan berikutnya, Prodi PGMI mulai dikenal dan diakui sama dengan PGSD pada tahun 2023. Pengakuan kesamaan alumni Program Studi PGMI dengan PGSD semakin menemukan jalan terang setelah terbit regulasi berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023. Dalam surat tersebut diatur bahwa formasi jabatan Ahli Pertama-Guru Kelas di SD bisa diisi oleh Lulusan Program Studi PGMI/PGSD. Namun, alumni masih saja menghadapi kendala dalam praktek penerimaan calon guru kelas SD/SDIT di beberapa daerah di Indonesia. Mereka untuk proses masuk dapodik, karena berijazah S1 PGMI. Padahal sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa Prodi PGMI dan Prodi PGSD memiliki bidang keilmuan yang samaa yaitu rumpun ilmu umum yang mencetak guru kelas MI/SD dengan kemampuan khas pada penguasan 5 mata Pelajaran umum (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKn).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna memperkuat eksistensi dan sekaligus memperjuangkan peluang kerja yang lebih luas bagi alumni Program Studi PGMI pada formasi jabatan guru kelas baik di MI/SD maka nomenklatur prodi PGMI perlu diubah nomenklaturnya menjadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di bawah Kemenag. Uraian naskah akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai argumentasi ilmiah bahwa penting dan urgen untuk melakukan perubahan nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah menjadi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan demikian, calon guru MI/SD adalah lulusan Program Studi S1- PGSD dari Kemenag/ Kemendikbudristek sudah tegas, jelas, tidak ambigu, tidak multi-tafsir sehingga semua pihak yang membutuhkan informasi ini tidak ada keraguan lagi padanya. Pendamaan prodi yang sama antara program studi di Kemenag dan Kemendikbud sudah banyak terjadi, seperti PAI di Kemenag dan PAI di Kemendikbudristek, PBA di Kemenag dan PBA di Kemdikbudristek. Pendidikan Matematika di Kemenag dan Pendidikan Matematika di Kemdikbudristek, dan masih banyak contoh lainnya..

1. Tujuan

Uraian ini berusaha untuk:

1. Mendeskripsikan peran dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang pendidikan.
2. Mendeskripsikan Pendidikan dasar menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
3. Mendeskripsikan Madrasah Ibtidaiyah dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
4. Mendeskripsikan peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
5. Mendeskripsikan peran LPTK PTKI dalam menghasilkan calon guru.
6. Mendeskripsikan standar pendidik (guru) untuk guru MI pada Standar Nasional Pendidikan
7. Mendeskripsikan inti keilmuan Program Studi PGMI adalah ilmu umum
8. Transformasi nomenklatur PGMI menuju PGSD di Kemenag
9. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Tap MPRS Nomor 27 tanggal 5 Juli 1966 tentang Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 6 tahun 1975 dan Nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 tertanggal 24 Mei 2023.
10. Keputusan Perkumpula Dosen Program Studi PGMI Indonesia (PD-PGMI Indonesia) Nomor 007/PD-PGMI/SK/VIII/2023 tertanggal 30 Juli 2023 tentang Standar Tujuan, Profil Lulusan, Body of Knowledge, dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3)
11. Bidang Pendidikan di Kementerian Agama

Tugas pokok Kementerian Agama (Kemenag) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 lampiran 14, Bab I Pasal 2 adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Tugas ini merupakan bentuk konkret pengamalan Pancasila; Sila pertama yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pengamalan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI Pasal 29 ayat l yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemenag mempunyai banyak tugas di antaranya; Pendidikan Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Haji dan Umroh, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Budha. Dalam struktur organisasi Kemenag terdapat bagian Pendidikan Islam yang memiliki tugas pokok yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dibantu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Diretorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Agama Islam, dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, salah satu peran dan tugasnya adalah penyelenggaraan pendidikan guru untuk mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum di madrasah. Sementara itu, penyelenggaraan Pendidikan formal berbentuk madrasah, dari Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah ‘Aliyah dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah.

1. Pendidikan Dasar Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Jenjang pendidikan formal, menurut Pasal 14 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Pasal 17 menyebutkan bahwa;

* 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
  2. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Hal ini sejalan dengan SKB Nomor 6 Tahun 1976 yang menyetarakan jenjang pendidikan madrasah dengan sekolah umum, yakni MI setara dengan SD.

Berbeda halnya dengan pendidikan keagamaan. Pemerintah pada Pasal 30 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan dengan tegas bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, bukan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal selanjutnya. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan bisa dilakukan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Sementara itu, bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yang dimaksud adalah pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Artinya, pemerintah menegaskan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) bukanlah pendidikan keagamaan atau diniyah karena MI merupakan salah satu jenjang pendidikan formal sebagaimana yang disebutkan di atas.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar termasuk MI dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum di MI untuk mata Pelajaran umum mengacu kurikulum yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek, sedangkan mata Pelajaran agama dan Bahasa Arab mengacu kurikulum yang dikembangkan oleh Kemenag. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kab./Kota untuk pendidikan dasar.

1. Madrasah Ibtidaiyah dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003

Jika menengok Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan keagamaan yang berada dalam naungan Kemenag secara formal sekarang telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Peningkatan Mutu pendidikan pada Madrasah pada tahun 1975 tepatnya Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975. Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP dan Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA. Adapun proporsi mata Pelajaran umum di madrasah yakni sebesar 70%.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada sistem pendidikan nasional, yaitu di antaranya :

* 1. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.
  2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
  3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Dengan kata lain, sejak SKB tersebut kedudukan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam system Pendidikan nasional sudah setara dengan sekolah dasar (SD). Karena, ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah dinilai sama dengan ijazah Sekolah dasar.

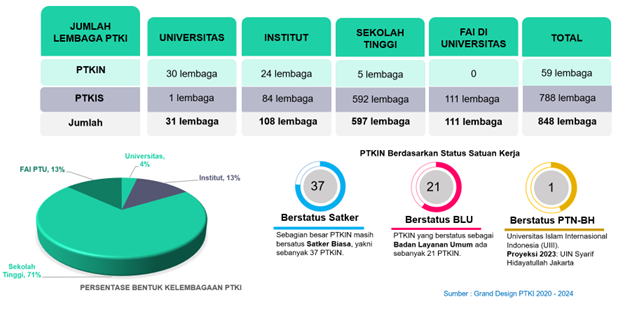
Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan salah satu bentuk pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar yang dikelola oleh Kemenag. Eksistensi MI semakin diakui bahkan sama dengan Sekolah Dasar (SD), atau ada pula yang menyatakan MI adalah SD Plus karena memiliki konten agama yang lebih banyak dibandingkan di SD. Merujuk UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan pada Pasal 17 ayat (2), Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu bentuk Pendidikan dasar yang sama dengan Sekolah Dasar. Pendidikan formal pada bentuk Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar merupakan landasan sebelum peserta didik memasuki jenjang lanjut Pendidikan dasar di Madrasah tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah pertama (SMP).

1. Perguuan Tinggi Keagamaan Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai salah satu bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan bagian dari salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. IAIN didirikan pada awal tahun 1960 sebagai suatu respons atas kebutuhan pemerintah akan tenaga pendidik yang ahli di bidang ilmu-ilmu keislaman, untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah. Akhirnya dalam perkembangannya IAIN jumlahnya semakin bertambah dan berkembang. Perkembangannya sejak masa orde baru bukan saja pada aspek fisiknya tetapi juga pada aspek tenaga pendidik atau dosennya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Islam akan Ilmu dan pengetahuan serta teknologi peran perguruan tinggi agama Islam semakin bertambah, oleh karena itu beberapa tahun ini beberapa IAIN telah berkembang menjadi universitas Islam. Dalam pelayanannya, selain memberi pendidikan bidang studi keagamaan juga memberikan pelayanan pendidikan umum. Saat ini Perguruan Tinggi Agama Islam meliputi 3 jenis, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Jumlah PTKIN di Indonesia saat ini total mencapai 58 perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut: 29 UIN, 24 IAIN, dan 5 STAIN.

Adapun tahun 2023 ini, menurut laman resmi Diktis Kemenag RI jumlah PTKI telah mencapai 848 lembaga. Menurut bentuknya, Universitas sebanyak 31 lembaga, Insttut sebanyak 108 lembaga, sekolah tinggi sebanyak 597 lembaga, dan FAI di Universitas sebanyak 111 lembaga. Gambar 1 di bawah ini menyajikan grafik jumlah PTKI di Kemenag.



Gambar 1. Statistik Jumlah PTKI di Kemenag Tahun 2023

1. Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru di Indonesia, sebelum diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara eksplisit diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuknya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP, yang keberadaannya di bawah universitas). Lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga pencetak tenaga-tenaga pendidik yang profesional. LPTK adalah lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan. Yang termasuk LPTK adalah IKIP, FKIP, dan STKIP di bawah pengawasan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Sementara yang termasuk LPTK di bawah pengawasan Kementerian Agama adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK). Secara umum ada dua fungsi LPTK yaitu fungsi pertama LPTK yang fungsinya hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan yang kedua LPTK yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan hanya dalam jabatan.

LPTK merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia. LPTK memiliki tugas pokok untuk mendidik calon-calon guru TK/RA hingga perguruan tinggi. Sebagai lembaga penghasil guru, peranan LPTK sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena guru merupakan aktor penting yang berperan dalam meningkatkan pendidikan.

Sekarang ini, LPTK sedang memasuki era baru di mana dalam setiap institusi terdapat misi ganda yaitu misi utama mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program pendidikan tenaga kependidikan dan misi kedua yaitu melalui berbagai program non-kependidikan untuk mempersiapkan tenaga profesional di luar profesi kependidikan.

Ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau MA. Dan ada LPTK yang khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi misalnya guru pendidikan luar biasa dan guru olahraga kesehatan. Dengan kata lain, tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan serta keahliannya. Berdasarkan output tersebut, setiap LPTK membuka jurusan/program studi yang sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan, seperti jurusan/program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang ditujukan untuk mencetak calon Guru Kelas MI. Berdasarkan SKB di atas, maka alumni PGMI juga bisa ditempatkan sebagai Guru Kelas SD karena pada dasarnya kemampuan/kompetensi yang dimiliki alumni PGMI sama/sebanding dengan alumni PGSD dan bahkan lebih banyak karena alumni PGMI dibekali kemampuan tambahan yakni bidang keagamaan yang belum tentu dimiliki oleh alumni PGSD. Kesetaraan tersebut didasarkan pada kesamaan jenjang/level sekolah yang kemudian nantinya akan diajar oleh alumni PGMI.

Kesamaan lainnya juga diatur dan ditunjukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tertanggal 4 Mei 2007 yang mempertegas hal tersebut. Peraturan tersebut menegaskan bahwa kualifikasi akademik guru SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat yaitu “harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi”. Dari aspek kompetensi, terungkap dari peraturan tersebut bahwwa kompetensi inti guru SD/MI sama persis dengan karakteristik utama yaitu penguasaan 5 mata Pelajaran umum yaitu Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKn.

1. Standar Pendidik untuk Madrasah Ibtidaiyah

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah menentukan setidaknya 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua lembaga penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta. Salah satu standar yang ditetapkan oleh pemerintah pada peraturan tersebut adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dituangkan dalam BAB VI Standar Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) sebagaimana disebutkan pada pasal 20 ayat (4) bahwa pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum sarjana (S1) pendidik pada Jenjang Pendidikan dasar jalur formal.

Berdasarkkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa guru di MI ada lima jenis yaitu:

1. Guru Kelas
2. Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI (Al-Quran Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam)
3. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab
4. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
5. Guru Mata Pelajaran Seni, Budaya, dan Prakarya (SBdP)
6. Guru Bimbingan dan Konseling

Merujuk Permendiknas No. 16/2007 ditegaskan bahwa pendidik pada jenjang MI dijelaskan secara tegas bahwa kualifikasi pendidik untuk jenjang SD/MI adalah lulusan D-IV atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari prodi terakreditasi. Untuk pendidik sebagai Guru Kelas SD/MI, maka latar belakang pendidikan yang sesuai adalah PGSD atau PGMI. Dengan demikian, alumni PGMI maupun alumni PGSD memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru kelas MI/SD. Di bagian kompetensi inti guru MI/SD juga diungkapkan dalam peraturan tersebut bahwa kompetensi guru MI/SD sama yakni dengan kekhasan penguasaan 5 Mata Pelajaran Umum di MI/SD yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKn. Ini artinya, kompetensi inti bagi guru kelas MI/SD pada dasarnya adalah ilmu umum.

Jika mencermati macam-macam jenis guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah tersebut, maka LPTK yang mencetak guru di Madrasah Ibtidaiyah juga beragam. Dengan kata lain, Prodi PGMI tidak memiliki peran untuk mencetak semua jenis guru di MI. Apabila dipetakan menjadi jenis guru dan kualifikasi pendidikannya maka dapat diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jenis Guru MI dan Kualifikasi Pendidikannya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Guru MI | Kualifikasi Pendidikan |
| 1 | Guru Kelas | DIV/S1-PGMI/PGSD |
| 2 | Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI (Al-Quran Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam) | DIV/S1-PAI/PRODI KEAGAMAAN LAINNYA |
| 3 | Guru Mata Pelajaran Pendidikan Bahasa Arab | DIV/S1-PBA |
| 4 | Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | DIV/S1-Penjasorkes/PJOK |
| 5 | Guru Mata Pelajaran Seni, Budaya, dan Prakarya (SBdP) | DIV/S1-Pendidikan Seni |
| 6 | Guru Bimbingan dan Konseling | DIV/S1-Bimbingan dan Konseling |

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, peran Prodi PGMI yaitu mencetak calon guru kelas di MI/SD, sama dengan Prodi PGSD mencetak calon guru SD/MI. Keilmuan Prodi PGMI juga sama dengan Prodi PGSD. Dengan demikian, Prodi PGMI sebetulnya adalah Prodi PGSD.

1. Inti Keilmua Prodi PGMI adalah Ilmu Umum

Program studi PGMI merupakan pendidikan tinggi di Kemenag yang berfokus untuk mendidik dan menghasilkan calon guru kelas MI/SD. Pengetahuan yang dikembangkan dan dibelajarkan di program studi PGMI mengacu capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) sebagai guru kelas MI/SD. Gambaran mengenai kompetensi guru kelas MI/SD tercantum secara spesifik dalam Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa kompetensi guru MI/SD meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogic.

Berikut ini diuraikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menguasai 4 kompetensi guru yang dijabarkan ke dalam kompetensi inti guru kelas MI/SD, yaitu:

1. Bidang Kompetensi Pedagogik
2. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
3. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD/MI (Bhs. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn).
4. Kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD/MI.
5. Kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD/MI.
6. Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 5 mata pelajaran SD/MI.
7. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam 5 mata pelajaran SD/MI.
8. Pendekatan pembelajaran tematik
9. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
10. Tujuan pembelajaran untuk 5 mata pelajaran SD/MI.
11. Pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 5 mata pelajaran SD/MI
12. Pemilihan materi 5 mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
13. Penataan materi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
14. Pengembangan indikator dan instrumen penilaian.
15. Prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
16. Komponen-komponen rancangan pembelajaran.
17. Prosedur rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
18. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
19. Penggunaan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 5 mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
20. Pengambilan keputusan transaksional dalam 5 mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.
21. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
22. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
23. Penyediaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
24. Penyediaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
25. Strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
26. Praktik komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
27. Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik 5 mata pelajaran SD/MI.
28. Aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik 5 mata pelajaran SD/MI.
29. Penentuan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
30. Pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
31. Pengadministrasian penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen.
32. Praktik análisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
33. Praktik evaluasi proses dan hasil belajar
34. Penggunaan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
35. Penggunaan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
36. Pengomunikasian hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
37. Pemanfaatan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
38. Pelaksanaan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
39. Pemanfaatan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.
40. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI
41. Bidang Kompetensi Kepribadian
42. Penghargaan terhadap peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
43. Sikap guru yang sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
44. Perilaku guru yang jujur, tegas, dan manusiawi.
45. Perilaku guru yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
46. Perilaku guru yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
47. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
48. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
49. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
50. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
51. Bekerja mandiri secara profesional.
52. Memahami kode etik profesi guru.
53. Menerapkan kode etik profesi guru.
54. Berperilaku sesuai dengan kode etik guru
55. Bidang Kompetensi Sosial
56. Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
57. Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
58. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
59. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
60. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
61. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
62. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
63. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya
64. melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
65. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain
66. Bidang Kompetensi Profesional
67. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung Lima (5) Mapel Umum

* Bahasa Indonesia

1. Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
2. Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
3. Menguasai dasar-dasar dan kaidah Bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)
5. Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
6. Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.

* Matematika

1. Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya
2. dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
3. Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
4. Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta. penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

* IPA

1. Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
3. Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

* IPS

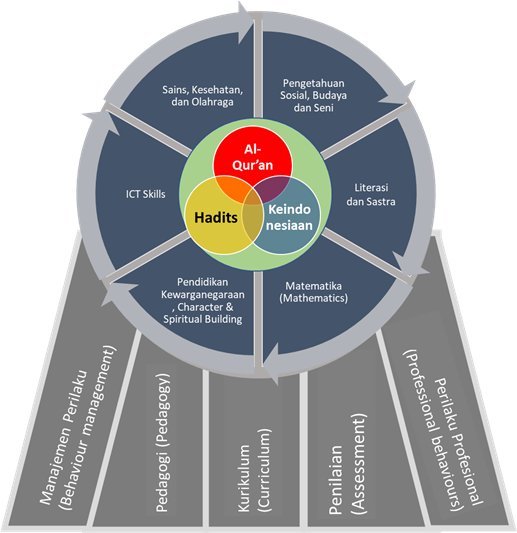
1. Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
2. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
3. Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan Masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
4. Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.

* PKn

1. Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
2. Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
3. Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
4. Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.
5. Standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
6. Kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
7. Tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
8. Pemilihan materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
9. Pengolahan materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
10. Pelaksanaan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\ terus menerus.
11. Pemanfaatan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
12. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
13. Partisipasi kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
14. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
15. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Berdasarkan uraian kompetensi inti dari 4 kompetensi guru kelas MI/SD dapat dilihat bahwa inti keilmuan guru kelas MI/SD adalah 5 mata Pelajaran umum, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKn. Jadi, inti keilmuan guru kelas MI/SD bukan ilmu agama.

Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Perkumpula Dosen Program Studi PGMI Indonesia (PD-PGMI Indonesia) Nomor 007/PD-PGMI/SK/VIII/2023 tertanggal 30 Juli 2023 tentang Standar Tujuan, Profil Lulusan, *Body of* Knowledge, dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang menunjukkan bahwa. body *of knowledge* Prodi PGMI program sarjana yang utama merupakan ilmu umum, seperti di antaranya yaitu pada pilar keguruannya terdiri dari 4 rumpun keilmuan yaitu manajemen perilaku, pedagogi, kurikulum, penilaian, dan perilaku professional. Pada poros utama kependidikan dasar untuk pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah mencakup 6 rumpun keilmuan yaitu: literasi, matematika, Pendidikan kewarganegaraan, Pembangunan karakter dan spiritual, keterampilan ICT, pengetahuan sains, Kesehatan dan olahraga, serta pengetahuan sosial, budaya dan seni. Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Qur’an dan Hadis serta nilai-nilai keindonesiaan sebagai sumber nilai yang menjadi ruh, diintegrasikan, dan diamalkan ke dalam berbagai ilmu umum dalam Prodi PGMI sehingga diharapkan lulusan akan menjadi guru kelas MI/SD yang kompeten, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan keIndonesian. *Body of knowledge* Prodi S1 PGMI dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Body of Knowledge Prodi PGMI Program Sarjana

1. Transformasi Nomenklatur PGMI Menuju PGSD di Kemenag

Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) adalah Program Studi yang didirikan sebagai tindak lanjut terbitnya UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yakni mempersiapkan calon guru MI/SD. Berdasarkan Keputusan Perkumpulan Dosen Program Studi PGMI Indonesia (PD-PGMI Indonesia) Nomor 007/PD-PGMI/SK/VIII/2023 tertanggal 30 Juli 2023 tentang Standar Tujuan, Profil Lulusan, Body of Knowledge, dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Sarjana (S1), Magiste (S2), dan Doktor (S3) ditegaskan bahwa penyelenggaraan Prodi S1 PGMI bertujuan untuk menghasilkan calon-calon guru kelas di MI/SD yang memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial dengan penguasan dan keahlian pada 5 mapel umum, yaitu Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn.

Profil utama lulusan Program Studi PGMI adalah sebagai calon pendidik/guru kelas MI/SD yang berpengetahuan luas, mendalam dan mutakhir; berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas serta bertanggungjawab berlandaskan etika Islam, keilmuan dan keahlian. Program PGMI secara institusional telah memberikan ruang gerak, arah, kebijakan serta strategi dalam kerangka menyiapkan kompetensi guru kelas agar menjadi ahli dan profesional secara akademik, serta memiliki pengetahuan keguruan yang menjadi modal dasar untuk menjadi tenaga pendidik yang layak, kompeten, serta terikat dengan kode etik keguruan pada jenjang MI/SD.

Perkumpulan Dosen Program Studi PGMI Indonesia mempertegas hal tersebut melalui SK PD-PGMI Indonesia Nomor: 007/PD-PGMI/SK/VIII/2023 tentang Standar Tujuan, Profil Lulusan, Body Of Knowledge, dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3). Dalam Surat Keputusan tersebut diatur bahwa tujuan program studi PGMI pada Program Sarjana adalah “menghasilkan calon pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar yang memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn”. Jadi penekanan lulusan Prodi PGMI adalah mencetak calon guru kelas di tingkat MI/SD yang memiliki keahlian dalam pembelajaran 5 mata Pelajaran umum sebagai kompetensi intinya. Dokumen mengenai SK tersebut dapat diunduh di link website resmi PD-PGMI Indonesia ([dokumen](https://www.adpgmiindonesia.org/wp-content/uploads/2023/08/KEPUTUSAN-PD-PGMI-TENTANG-STANDAR-TUJUAN-PROFIL-LULUSAN-BODY-OF-KNOWLEDGE-DAN-CAPAIAN-PEMBELAJARAN-LULUSAN-PRODI-PGMI-2023-NEW.pdf)).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Prodi PGMI pada masa lalu, seperti banyak anggapan keliru dari elemen masyarakat bahwa Prodi PGMI adalah Prodi Ilmu Agama padahal sebetulnya inti keilmuan Prodi PGMI adalah ilmu umum, Prodi PGMI lebih dikenal sebagai penghasil guru agama di MI padahal sebetulnya adalah calon guru kelas di MI/SD yang berfokus keahlian pada 5 mata Pelajaran umum (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn), kemudian alumni Prodi PGMI di beberapa daerah dianggap tidak setara dengan Prodi PGSD sehingga banyak yang ditolak ketika melamar sebagai pendaftar CPNS/P3K ataupun PPPG prajabatan untuk posisi guru kelas di sekolah dasar. Selain itu, di masa depan agar Prodi PGMI secara lebih tegas diperlakukan sama dengan PGSD sekaligus agar alumni/ lulusan Prodi PGMI memperoleh peluang kerja lebih luas yakni bukan hanya bisa mendaftar sebagai guru kelas di MI tetapi guru kelas di SD sekaligus bisa lolos semua proses adminsitrasi seperti Dapodik dan Simpatika maupun system kepegawaian sejenis maka dengan terbitnya **Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor B-4866/DJ.I.III/HM.01/3/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 tentang Permintaan Naskah Akademi Perubahan Izin Penyelenggaraan Program Studi selain Rumpun Ilmu Agama**  dipandang sangat penting dan urgen sekaligus momentum yang sagat teppat untuk:

* 1. Mempertegas jatidiri Prodi PGMI sebagai bagian dari Prodi dengan inti keilmuan Ilmu Umum dengan spesifikasi keahlian calon guru kelas MI/SD dengan penguasaaan 5 mata Pelajaran umum yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn.
  2. Melakukan perubahan nomenklatur program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah menjadi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di bawah Kemenag, karena Prodi PGMI secara jelas dan terang benderang adalah memiliki inti keilmuan rumpun ilmu umum, bukan ilmu agama, dan esensinya sama dengan PGSD.

Tabel 2 Perbandingan dan Kesamaan Prodi PGMI dan PGSD

| ***No.*** | ***Aspek*** | ***PGMI*** | ***PGSD*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Singkatan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 2 | Institusi Pengawas/ Pembina | Kementerian Agama | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Rumpun Keilmuan | Pendidikan | Pendidikan |
| 4 | Bidang Keahlian | Pendidikan Dasar | Pendidikan Dasar |
| 5 | Jenjang Sarjana | Strata 1 | Strata 1 |
| 6 | Gelar Sarjana | Sarjana Pendidikan : S.Pd | Sarjana Pendidikan : S.Pd |
| 7 | Profil Utama Lulusan | Calon Pendidik (Guru Kelas) MI/SD | Calon Pendidik (Guru Kelas) di SD |
| 8 | Acuan Kurikulum | KKNI/OBE | KKNI/OBE |
| 9 | Sistem Perkuliahan | Sistem Kredit Semester (SKS) | Sistem Kredit Semester (SKS) |
| 10 | Total Kredit | 144 – 159 SKS | 144 – 150 SKS |
| 11 | Mata kuliah praktikum Profesi | Microteaching, Magang, PPLK | Microteaching, Magang, PPLK |
| 12 | Lembaga Akreditasi | LAMDIK | LAMDIK |

Dengan transformasi nomenklatur PGMI ke PGSD ini, Kemenag diharapkan akan lebih focus pada peningkatan kualitas mutu pendidikan dasar di MI sekaligus mendorong internasionalisasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Kemenag untuk memajukan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah.Di sampaing itu, perguruan tinggi di Kemenag akan semakin diminati oleh Masyarakat dan unggulan. Dengan perubahan nomenklatur PGMI menjadi PGSD diharapkan pula peluang kerja lulusan Prodi ini di Kemenag untuk menjadi guru kelas semakin meningkat, peluang kerja semakin luas, animo penerimaan mahasiswa baru semakin meningkat, pengembangan kelembagaan prodi semakin kuat dan berdaya saing, kolaborasi antar perkumpulan dosen Prodi antar kementerian semakin intens dalam rangka pembangunan pendidikan dasar di Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan berkeadaban dengan semangat nilai-nilai moderasi beragama dan *rahmatan lil ‘alamin.*

## **KURIKULUM**

*SIlahkan dilengkapi dengan diisi kurikulum Prodi PGMI masing-masing.*

## **DATA DOSEN**

*Silahkan diisi sesuai kondisi Prodi PGMI masing-masing.*

## **DATA MAHASISWA**

*Silahkan diisi sesuai kondisi Prodi PGMI masing-masing.*

## **DATA ALUMNI**

*Silahkan diisi sesuai kondisi Prodi PGMI masing-masing.*

## **FASILITAS PENDIDIKAN YANG DIMILIKI**

*Silahkan diisi sesuai kondisi Prodi PGMI masing-masing.*

## **LAMPIRAN 1: SK IZIN PROGRAM STUDI**

## **LAMPIRAN 2: SK AKREDITASI BAN PT**

## **LAMPIRAN 3: SK PENGELOLA PROGRAM STUDI**